

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pada Bab II telah diuraikan kondisi riil daerah yang ada di Kota Malang serta tantangan-tantangan riil yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan tersebut, dibutuhkan program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran. Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan Pemerintahan Daerah tersebut, maka diperlukan pendanaan yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan subsistem dari sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut telah diatur dalam beberapa aturan Perundang-Undangan, antara lain

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Peraturan-peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan agar Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, (baik APBD, Perubahan APBD, maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD

Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan APBD Tahun 2009 – 2013 perlu diketahui komposisi dan proporsi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah dan Neraca Daerah Tahun 2009 – 2013.

1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Dana Perimbangan; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari :

- (1) Hasil Pajak Daerah;
- (2) Hasil Retribusi Daerah;
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
dan
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari :

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- (2) Dana Alokasi Umum, dan
- (3) Dana Alokasi Khusus.

Sumber dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :

- (1) Pendapatan Hibah;
- (2) Dana Darurat;
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;
- (4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
- (5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersifat “*given*” dan merupakan dana transfer sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi. Sedangkan sumber pendapatan yang dapat ditentukan target perolehannya oleh Pemerintah Daerah adalah sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Secara rinci Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Rata-Rata Pendapatan Daerah Kota Malang
Tahun 2009 – 2013

NO	Uraian	Tahun Anggaran					Pertumbuhan Rata-rata (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan daerah	798,840,456,272.2	988,288,099,524.7	1,102,655,771,801.7	1,356,369,664,977.8	1.485.322.092.001,8	16.71
1.1	Pendapatan asli daerah	92,476,383,151.21	113,490,265,808.7	185,818,563,982.76	230,295,806,325.83	326,629,247,412.26	34.46
1.1.1	Pajak daerah	49,467,066,282.96	60,151,082,871.20	125,332,979,877.83	159,124,119,792.89	238.499.748.161,57	46.76
1.1.2	Retribusi daerah	23,533,733,096.00	27,342,779,004.00	31,217,425,090.00	35,596,756,524.00	38.366.632.198,90	13.04
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11,623,194,754.85	13,255,093,254.18	13,313,185,918.32	14,350,056,538.28	21.551.938.094,82	17.64
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7,852,389,017.40	12,741,310,679.40	15,954,973,096.61	21,224,873,470.66	28.210.928.956,97	36.72
1.2	Dana perimbangan	599,009,597,671.0	626,023,144,999.0	646,871,523,364.00	817,671,023,179.00	866.094.455.871,00	9.89
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	106,673,389,671.0	123,635,357,999.0	97,800,736,364.00	46,100,612,909.00	89.091.808.871,00	6.08
1.2.2	Dana alokasi umum	471,739,208,000.0	494,910,987,000.0	533,491,887,000.00	665,927,808,000.00	746.686.937.000,00	12.41
1.2.3	Dana alokasi khusus	20,597,000,000.00	7,476,800,000.00	15,578,900,000.00	21,897,310,000.00	30.315.710.000,00	30.92
1.3	Lain-lain pendapatan	107,354,475,450.0	248,774,688,717.0	269,965,684,455.00	308,402,835,473.00	320.810.237.102,00	39.38

	daerah yang sah						
1.3.1	Pendapatan hibah	-	-	11,000,000,000.00	-	24.500.000.000,00	
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	0,00	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	66,177,847,450.00	89,300,667,042.00	105,083,231,095.00	101,923,440,473.00	106.204.436.102,00	12.72
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	9,501,750,000.00	124,407,431,675.0	148,927,460,600.00	154,326,955,000.00	165.240.656.000,00	309.93
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	31,674,878,000.00	35,066,590,000.00	4,954,992,760.00	52,152,440,000.00	24.865.145.000,00	206.24

Dari tabel di atas tampak bahwa dalam kurun waktu Tahun 2009 – 2013 Pertumbuhan rata-rata Pendapatan Daerah adalah sebesar 16,71 %. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendanaan dengan proporsi terbesar dalam Pendapatan Daerah, dimana pada Tahun 2013 mencapai Rp. 746,686,937,000.00 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,89 %. Diikuti oleh Pajak Daerah, dimana pada Tahun 2013 telah mencapai Rp. 238.499.748.161,57 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 46,76 %.

Adapun Pertumbuhan rata-rata tertinggi dari Tahun 2009 – 2013 adalah pada Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, dengan prosentase sebesar 309.93 % dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya, dengan prosentase sebesar 206.24 %.

Angka tersebut dapat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan secara nasional dan di daerah lain, khususnya provinsi Jawa Timur. Secara nasional, setiap tahun sejak 2009 hingga 2012 seluruh daerah di Indonesia menganggarkan kenaikan Pendapatan Daerah yang secara rata-rata peningkatannya mencapai 14,7% per tahun. Peningkatan pendapatan tertinggi adalah pada tahun 2012 sebesar 19,9%, di mana Pendapatan Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 459,9 triliun meningkat menjadi sebesar Rp. 551,6 triliun pada tahun 2012. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2009 hingga 2012. Pada tahun 2009 secara nasional Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah masih di kisaran Rp. 19,5 triliun, kemudian mengalami rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 47,2%, sehingga di tahun 2012

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai Rp. 58,0 triliun.

Persentase peningkatan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2011 yaitu sebesar 89,7% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya dan di tahun 2012 dianggarkan meningkat 38,3%. Berdasarkan data trend 2009 hingga 2012 maka kita juga bisa melihat gambaran tingkat pertumbuhan total Pendapatan Daerah beserta komponen utamanya yaitu PAD dan Dana Perimbangan. Secara agregat pendapatan seluruh daerah per provinsi dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan total pendapatan daerah yang tertinggi adalah di Provinsi Banten (19,6%), lalu diikuti oleh Provinsi Bali (19,5%) dan Provinsi Sumatera Utara (19,4%). Sedangkan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang terendah adalah di Provinsi Sulawesi Utara (9,9%), Provinsi Maluku Utara (10,0%), dan Povinsi Kalimantan Timur (10,0%).

Bila dilihat berdasarkan rata-rata pertumbuhan PAD per tahunnya yang tertinggi adalah terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 35,2%, lalu diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 31,6%, dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 31,5%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD yang terendah yaitu di bawah 10% terdapat di Provinsi Aceh yaitu di kisaran 5,0%, Provinsi Bengkulu. sebesar 5,8%, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,0% dan Provinsi Riau sebesar 8,7%.

Karena untuk menjadi kota Mandiri kemampuan keuangan Daerahnya untuk mencukupi pengeluarannya harus bisa mencapai lebih besar dari 75% sedangkan Kota Malang rata-rata kemampuan untuk mencukupi keuangannya sendiri baru sekitar 16.71%. Hal ini

berarti Kota Malang jika dilihat dari kemampuan keuangannya belum dapat dikatakan mandiri karena sumber keuangannya sebagian besar masih ditopang dari pendanaan Pemerintah Pusat.

Kecilnya tingkat kemandirian keuangan daerah sebenarnya disebabkan oleh kecilnya nilai faktor penentu besaran Pendapatan Asli Daerah yang diserahkan pada Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 6 bersumber dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah,. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Disatu sisi pendapatan dari pajak yang nilainya cukup besar seperti misalnya pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, pajak kendaraan bermotor masuk pada pendapatan pajak Daerah Propinsi.

Melihat kenyataan tersebut betapa besar pajak kendaraan bermotor yang masuk sebagai pendapatan daerah, tetapi tidaklah masuk pada daerah kota/kabupaten melainkan masuk pada daerah Propinsi, sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota/ Kabupaten dari tahun ketahun nilainya relatif tetap rendah. Berdasarkan pada hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran terkait dengan peranan PAD terhadap belanja langsung daerah serta masih kecilnya tingkat kemandirian keuangan Kota Malang.

Saran serta langkah-langkah yang bisa ditempuh pemerintah Kota Malang adalah dengan meningkatkan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menumbuh

kembangkan iklim investasi di kota Malang agar lebih mempunyai daya tarik bagi calon investor. Karena dengan meningkatnya investasi di kota Malang akan dapat menambah pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah maupun retribusi daerah mengingat kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD sangat besar.

Pengelolaan kekayaan daerah terpisahkan perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintahan Kota Malang, karena melalui pengelolaan kekayaan daerah terpisahkan Pendapatan Asli Daerah kota Malang akan dapat meningkat, mengingat pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah terpisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen sumber pendapatan yang pencapaian targetnya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah. Pencapaian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009-2013

Thn	Target		Realisasi		Rasio Efektivitas	Ket.
	PAD (rp)	Pertumbuhan	PAD (rp)	Pertumbuhan		
2009	92,772,122,460.02		92,476,383,151.21		99.68	
2010	104,802,485,741.16	12.97	113,490,265,808.78	22.72	108.29	
2011	162,332,588,459.55	54.89	185,818,563,982.76	63.73	114.47	
2012	200,671,267,208.87	23.62	230,295,806,325.83	23.94	114.76	
2013	298.417.399.028,87	48.71	317.850.423.684,26	38,02	106,51	
Rata-rata Per Tahun		35.05		37.10	108,74	

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 rata-rata pertumbuhan sebesar 35,05%. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 rata-rata pertumbuhan sebesar 37,10 %

Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 secara umum mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 target PAD meningkat sebesar Rp.12.030.363.281,14 atau sebesar 12,97 % jika dibandingkan dengan target tahun 2009. Tahun 2011 target PAD meningkat sebesar Rp. 57.530.102.718,39 atau sebesar 54,89 % jika dibandingkan dengan target tahun 2010. Tahun 2012 target PAD meningkat sebesar Rp.38.338.678.749,32 atau sebesar 23,62 % jika dibandingkan dengan target tahun 2011. Sedangkan tahun 2013 target PAD meningkat sebesar Rp. 97.746.131.820,00 atau sebesar 48,71% jika dibandingkan dengan target tahun 2012.

Secara rinci target Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 pada masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009 - 2013

	URAIAN	TARGET (Rp)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Hasil Pajak Daerah	49.144.638.669,9	56.142.003.282,9	104.644.701.180,71	125.828.676.756,77	210.287.899.778,18
2	Hasil Retribusi Daerah	22.880.899.999	26.019.619.499	29.130.485.000	33.999.701.999	38.366.632.198,90
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.628.777.255,85	11.706.439.124,26	13.258.455.293,82	20.624.513.916,82	21.551.938.094,82
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.117.806.535,27	10.934.423.835	15.298.946.985,02	20.218.374.536,28	28.210.928.956,97
JUMLAH		92.772.122.460,02	104.802.485.741,16	162.332.588.459,55	200.671.267.208,87	298.417.399.028,87

Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 secara umum mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 realisasi PAD meningkat sebesar Rp.21.013.882.657,57 atau sebesar 22,72 % jika dibandingkan dengan target tahun 2009. Tahun 2011 realisasi PAD meningkat sebesar Rp. 72.328.298.173,98 atau sebesar 63,73 % jika dibandingkan dengan target tahun 2010. Tahun 2012 realisasi PAD meningkat sebesar Rp. 44.477.242.343,07 atau sebesar 23,94 % jika dibandingkan dengan target tahun 2011. Sedangkan tahun 2013 realisasi PAD tahun 2013 mencapai Rp.87.554.617.358,43 atau 38,02% dari target anggaran.

Secara rinci realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 pada masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009 - 2013

	URAIAN	REALISASI (Rp)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Hasil Pajak Daerah	49.467.066.282,96	60.151.082.871,20	125.332.979.877,83	159.124.119.792,89	238.499.748.161,57
2	Hasil Retribusi Daerah	23.533.733.096,00	27.342.779.004,00	31.217.425.090,00	35.596.756.524,00	38.473.729.369,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.623.194.754,85	13.255.093.254,18	13.313.185.918,32	14.350.056.538,28	16.571.050.907,26
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.852.389.017,40	12.741.310.679,40	15.954.973.096,61	21.224.873.470,66	24.305.895.246,43
JUMLAH		92.476.383.151,21	113.490.265.808,78	185.818.563.982,76	230.295.806.325,83	317.850.423.684,26

Permasalahan dan Solusi

Walaupun Pendapatan Asli Daerah atau Pajak Daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, namun masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendapatan daerah yaitu:

- a. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan terhadap Pendapatan Daerah.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan perlu ditingkatkan.
- c. Sarana dan prasarana pendukung terutama untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan perlu ditingkatkan.

Solusi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi.

- c. Mengoptimalkan pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk pendanaan pembangunan daerah.
- d. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat.
- e. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak serta pelatihan teknologi komputerisasi / sistem Informasi manajemen pajak daerah
- f. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
- g. Melaksanakan evaluasi dan pemutahiran data secara berkesinambungan.
- h. Mengoptimalkan pendapatan dari piutang pajak daerah.

2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Proporsi penggunaan anggaran dapat dilihat dari proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Kota Malang Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2009 – 2013 (dalam Rp.)

NO	URAIAN		2009	2010	2011	2012	2013
1	2		3	4	5	6	7
2.1	BELANJA TIDAK LANG- SUNG	ANGGARAN	448,511,642,802.69	614,252,789,297.37	636,546,820,751.64	633,678,957,742.37	752.329.517.210,27
		REALISASI	437,716,514,512.03	593,996,588,240.46	678,823,982,158.50	648,419,281,076.37	752.757.621.404,05
		%	97.59	96.70	106.64	102.33	100,06
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN	377,417,702,518.28	500,730,670,121.23	557,065,649,744.33	612,383,839,454.35	686.948.580.883,52
		REALISASI	368,239,197,506.00	490,523,672,242.00	606,120,627,899.81	629,284,953,483.64	689.540.857.441,10
		%	97.57	97.96	108.81	102.76	100,38
2.1.2	BELANJA BUNGA	ANGGARAN	2,146,989,033.57	2,196,448,962.78	682,272,974.81	682,272,974.81	36.157.840,95
		REALISASI	1,772,673,056.03	2,196,448,962.78	682,272,974.81	180,003,164.73	36.157.840,95
		%	82.57	100.00	100.00	26.38	100,00
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	ANGGARAN	-	-	-	-	0.00
		REALISASI	-	-	-	-	0.00
		%	-	-	-	-	0.00
2.1.4	BELANJA HIBAH	ANGGARAN	58,246,430,500.00	82,742,250,000.00	61,401,396,419.00	17,926,364,000.00	62.344.799.800,00
		REALISASI	58,245,490,500.00	82,510,449,000.00	60,846,467,169.00	17,631,219,000.00	62.297.290.300,00
		%	100.00	99.72	99.10	98.35	99,92
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	ANGGARAN	9,875,500,000.00	17,892,780,000.00	13,837,280,000.00	875,500,000.00	238.500.000,00
		REALISASI	9,346,535,000.00	8,475,793,500.00	8,637,026,000.00	676,728,700.00	129.250.000,00
		%	94.64	47.37	62.42	77.30	54,19

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH AN DESA	ANGGARAN	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
		REALISASI	63,254,600.00	64,402,800.00	63,549,200.00		73.314.450,00
		%	63.25	64.40	63.55	-	73,31
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	ANGGARAN	-	-	-	-	663.728.700,00
		REALISASI	-	-	-	-	663.728.700,00
		%	-	-	-	-	100,00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	ANGGARAN	725,020,750.84	10,590,640,213.36	3,460,221,613.50	1,710,981,313.21	1.997.749.985,80
		REALISASI	49,363,850.00	10,225,821,735.68	2,474,038,914.88	604,362,328.00	17.022.672,00
		%	6.81	96.56	71.50	35.32	0,85
2.2	BELANJA LANGSUNG	ANGGARAN	391,623,307,546.15	404,737,887,493.00	482,106,109,164.04	728,000,023,357.23	877.264.638.930,07
		REALISASI	371,411,671,684.88	373,971,057,079.13	369,407,140,670.52	603,893,364,536.40	737.221.252.303,40
		%	94.84	92.40	76.62	82.95	84,04
	JUMLAH BELANJA DAERAH	ANGGARAN	840,134,950,348.84	1,018,990,676,790.37	1,118,652,929,915.68	1,361,678,981,099.60	1.629.594.156.140,34
		REALISASI	809,128,186,196.91	967,967,645,319.59	1,048,231,122,829.02	1,252,312,645,612.77	1.489.978.873.707,45
		%	96.31	94.99	93.70	91.97	91,43

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2012 adalah sebesar 102,33% atau Rp. 648,419,281,076.37 dari anggaran awal sebesar Rp. 633,678,957,742.37. Realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2013, yaitu sebesar Rp. 752.757.621.404,05 atau 100,06% dari anggaran awal sebesar Rp. 752.329.517.210,27.

Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu Tahun 2009 – 2013 berkisar antara 76,62 sampai dengan 94,84.

Pada Tahun 2011, Realisasi Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 369,407,140,670.52 atau 76,62% dari anggaran awal sebesar Rp. 482,106,109,164.04. Dan untuk tahun anggaran 2012 Realisasi Belanja Langsung sebesar 82,95% dari target anggaran sebesar Rp. 728,000,023,357.23 dan terealisasi sebesar Rp.603,893,364,536.40. Sedangkan tahun anggaran 2013 Realisasi Belanja Langsung sebesar 84,04% dari target anggaran sebesar Rp. 877.264.638.930,07 dan terealisasi sebesar Rp.737.221.252.303,40.

Secara akumulatif, Jumlah Belanja Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu Tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan, namun secara realisasi cenderung menurun. Pada Tahun 2009 Realisasi Jumlah Belanja adalah sebesar Rp. 809,128,186,196.91 atau 96.31% dari Rp. 840,134,950,348.84. sedangkan pada Tahun 2013 Realisasi Jumlah Belanja adalah sebesar Rp.1.489.978.873.707,45 atau 91.43% dari

Rp.1.629.594.156.140,34.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Tabel 3.6.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Malang

No	Uraian	(n-3) (Rp) 2011	(n-2) (Rp) 2012	(n-1) (Rp) 2013	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	552.443.762.271,62	630.183.699.748,37	690.314.058.432,05	11,81
1	Belanja Pegawai	551.034.211.396,81	629.284.953.483,64	689.540.857.441,10	11,89
2	Belanja Bunga	682.272.974,81	180.003.164,73	36.157.840,95	(76,76)
3	Belanja bagi hasil	63.549.200,00	42.014.400,00	73.314.450,00	20,31
4	Belanja Bantuan Partai Politik	663.728.700,00	676.728.700,00	663.728.700,00	0,02
B	Belanja Langsung	55.086.416.503,00	85.967.092.577,50	77.757.227.365,00	23,25
1	Belanja honorarium PNS (Belanja Pegawai).	55.086.416.503,00	85.967.092.577,50	77.757.227.365,00	23,25
C	Pembiayaan Pengeluaran	27.696.928.387,14	36.754.146.414,64	17.171.900.460,32	(10,29)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
2.	Penyertaan Modal (investasi)	15.900.008.913,06	35.550.000.000,00	16.100.000.000,00	34,44
2	Pembayaran pokok utang	11.796.919.474,08	1.204.146.414,64	1.071.900.460,32	(50,39)
	TOTAL (A+B+C)	635.227.107.161,76	752.904.938.740,51	785.243.186.257,37	11,41

Keterangan : menghitung rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat mempergunakan rumus pada analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Analisis proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.7.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Malang

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp) (2013)	Tingkat pertum- buhan (%)	Proyeksi				
				Tahun n+1 (Rp) (2014)	Tahun n+2 (Rp) (2015)	Tahun n+3 (Rp) (2016)	Tahun n+4 (Rp) (2017)	Tahun n+5 (Rp) (2018)
A	Belanja Tidak Langsun- g	690.314.058.432,05	11,81	776.486.203.302,82	868.740.370.054,39	971.921.129.829,14	1.087.368.019.346,22	1.216.539.236.230, 70
1	Belanja Pegawai	689.540.857.441,10	11,89	775.722.474.602,82	867.940.370.054,39	971.121.129.829,14	1.086.568.019.346,22	1.215.739.236.230, 70
2	Belanja Bunga	36.157.840,95	(76,76)	-	-	-	-	-
3	Belanja bagi hasil	73.314.450,00	20,31	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Belanja Bantuan Partai Politik	663.728.700,00	0,02	663.728.700,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
				-				
B	Belanja Langsung	77.757.227.365,00	23,25	81.871.421.950,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	60.000.000.000,00
1	Belanja honorarium PNS (Belanja Pegawai).	77.757.227.365,00	23,25	81.871.421.950,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	60.000.000.000,00
				-	-	-	-	-
C	Pembiayaa- n Pengeluara- n	17.171.900.460,32	(10,29)	32.100.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00
1	Pembentuk- an Dana	-		-				

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

	Cadangan							
2.	Penyertaan Modal (investasi)	16.100.000.000,00	34,44	32.100.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00
2	Pembayaran pokok utang	1.071.900.460,32	(50,39)	-				
				-				
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	785.243.186.257,37	11,41	890.457.625.252,82	958.740.370.054,39	1.061.921.129.829,14	1.177.368.019.346,22	1.301.539.236.230,70

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009-2013 masih dijumpai permasalahan seperti kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Tidak tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang direncanakan karena dalam pelaksanaan belanja daerah pada setiap program dan kegiatan mengedepankan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis namun secara fisik program, kegiatan telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Hanya saja ada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena kegagalan dalam proses lelang;

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditempuh beberapa langkah meliputi:

1. pelaksanaan Bimtek dan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota tentang kebijakan Akuntansi serta mengadakan sarana dan prasarana secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tersebut

- sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur di bidang pendapatan.
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya.
 4. Mengadakan penagihan tunggakan pajak.
 5. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana dan prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- f. Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman

kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup :

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c. Pembayaran pokok utang;
- d. Pemberian pinjaman daerah.

Tabel 3.8.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2009 – 2013
(dalam Rp.)

NO	URAIAN	RENCANA / REALISASI	TAHUN ANGGARAN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	RENCANA	84,420,938,781.04	69,429,062,441.70	67,571,686,021.77	94,141,092,275.37	161.443.965.225,79
		REALISASI	84,420,938,781.04	69,429,062,441.70	67,413,371,689.77	94,141,092,275.37	161.443.965.225,79
		%	100.00	100.00	99.77	100.00	0.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	RENCANA	59,420,938,781.04	69,429,062,441.70	67,571,686,021.77	94,141,092,275.37	161.443.965.225,79
		REALISASI	59,420,938,781.04	69,429,062,441.70	67,413,371,689.77	94,141,092,275.37	161.443.965.225,79
		%	100.00	100.00	99.77	100.00	0.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	RENCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	0.00	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang	RENCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	0.00	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

	Dipisahkan	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	RENCANA	25,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REALISASI	25,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		%	100.00				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	RENCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		%					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	RENCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		%					
3.1.7	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	RENCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		%					
3.1.8	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lain Yang Sah	RENCANA	0	0.00	0.00	0.00	0,00
		REALISASI	0	0.00	0.00	0.00	0,00
		%					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	RENCANA	4,704,146,414.64	22,177,830,625.12	27,801,182,796.15	51,754,147,668.64	17.171.901.087,32

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

		REALISASI	4,704,146,414.64	22,177,830,625.12	27,696,928,387.14	36,754,146,414.64	17.171.900.460,32
		%	100.00	100.00	99.63	71.02	99.99
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	RENCANA	0.00	0.00	0.00	15,000,000,000.00	0
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	-	
		%					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	RENCANA	3,500,000,000.00	6,500,000,000.00	15,900,008,913.06	35,550,000,000.00	16.100.000.000,00
		REALISASI	3,500,000,000.00	6,500,000,000.00	15,900,008,913.06	35,550,000,000.00	16.100.000.000,00
		%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	RENCANA	1,204,146,414.64	15,677,830,625.12	11,901,173,883.09	1,204,147,668.64	1.071.901.087,32
		REALISASI	1,204,146,414.64	15,677,830,625.12	11,796,919,474.08	1,204,146,414.64	1.071.900.460,32
		%	100.00	100.00	99.12	100.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	RENCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		%					
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan	RENCANA	0		0.00	0.00	0,00
		REALISASI	0		0.00	0.00	0,00
		%					

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

	Pembiayaan Netto	RENCANA	79,716,792,366.40	47,251,231,816.58	39,770,503,225.62	42,386,944,606.73	144.272.064.138,47
		REALISASI	79,716,792,366.40	47,251,231,816.58	39,716,443,302.63	57,386,945,860.73	182.749.867.308,28
		%	100.00	100.00	99.86	135.39	126.67

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2009 – 2013 selalu memenuhi Rencana Target Penerimaan Pembiayaan Daerah (100%), kecuali pada Tahun 2011 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah hanya mencapai 99,77%.

Sedangkan pada Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada Tahun 2009 dan 2010 realisasi mencapai 100% dari Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah, namun pada Tahun 2011 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah hanya mencapai 99,63% dan pada Tahun 2012 hanya mencapai 71,02% dan pada Tahun 2013 mencapai 99,99%.

Adapun untuk Pembiayaan Netto, pada tahun 2009 dan 2010, realisasi pembiayaan sesuai dengan rencana pembiayaan (100%). Pada tahun 2011 realisasi pembiayaan hanya mencapai 99,86% dan pada tahun 2012 realisasi pembiayaan melebihi rencana pembiayaan hingga mencapai 135,39% dan pada tahun 2013 realisasinya mencapai 126,67%.

3.1.2. Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Merujuk ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan Neraca Daerah juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Pertumbuhan aset lancar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Pertumbuhan Aset Lancar Tahun 2009 – 2013

NO	URAIAN	Pertumbuhan rata-rata
		%
A	ASET LANCAR	30.28
1	Kas	30.98
	Kas di Kas Daerah	31.24
	Kas di Bendahara Penerimaan	-44.93
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5715.70
2	Investasi Jangka Pendek	-
3	Piutang	43.26
	Piutang Pajak	50.35
	Piutang Retribusi	16.23
	Piutang Dana Bagi Hasil	20.84
	Piutang Dana Alokasi Umum	-
	Piutang Dana Alokasi Khusus	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-50.60
	Piutang Lain-lain	182.22
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-
4	Persediaan	31.44

Pertumbuhan Rata-rata Aset Lancar Pemerintah Kota Malang memiliki kenaikan yang cukup besar yaitu 30,28%. Pertumbuhan rata-rata tertinggi ada pada komponen Piutang, dengan pertumbuhan sebesar 43, 26%, diikuti komponen Kas dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 30,98%, dan komponen Persediaan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 31,44%.

Tabel 3.10.
Pertumbuhan Aset Tetap dan Dana Cadangan
Tahun 2008 - 2012

NO.	URAIAN	PERTUMBUHAN RATA-RATA
		%
B	ASET TETAP	6.60
	Tanah	2.97
	Peralatan dan Mesin	16.39
	Gedung dan Bangunan	13.38
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.60
	Aset Tetap Lainnya	0.96
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	225.94
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-
C	DANA CADANGAN	-
	Dana Cadangan	-

Investasi Jangka Panjang yang dilakukan Pemerintah Kota Malang, memberikan sumbangan terbesar dalam Neraca Aset Daerah, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 126,13% pada komponen Investasi Permanen, yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel 3.11.
Pertumbuhan Aset Lainnya
Tahun 2008 - 2012

NO.	URAIAN	PERTUMBUHAN RATA-RATA
		%
D	ASET LAINNYA	53.24
	BOT	49.79
	Tagihan Penjualan Angsuran	-
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-58.15

	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-
	Aset Tak Berwujud	47.98
	Aset Lainnya	25.54

Pertumbuhan Aset Lainnya pada kurun waktu Tahun 2008 – 2012 memiliki pertumbuhan rata-rata yang tinggi, yaitu sebesar 53,24%. Komponen yang memiliki pertumbuhan rata-rata tertinggi adalah *Build Operate Transfer* (BOT) yaitu sebesar 49,79%, diikuti oleh komponen Aset Tak Berwujud dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 47,98% dan komponen Aset Lainnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 25,54%. Sedangkan komponen Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan sebesar 58,15%.

Tabel 3.12
Analisis Rasio Keuangan Kota Malang

NO	Uraian	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1.	Rasio lancar (current ratio)	21,65	104,33	73,11
2.	Rasio quick (quick ratio)	20,04	97,37	69,79
3.	Rasio total hutang terhadap total asset	0,0013	0,00037	0,00062
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,0013	0,00037	0,00062
5.	Rata-rata umur piutang	-	-	-
6.	Rata-rata umur persediaan	-	-	-

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja di berbagai sektor yang ada di Kota Malang. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Adapun proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13.
Proyeksi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2013	Tingkat pertum- buhan	Proyeksi				
				Tahun n+1	Tahun n+2	Tahun n+3	Tahun n+4	Tahun n+5
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
				2014	2015	2016	2017	2018
A	Belanja Tidak Langsung	690,314,058,432,05	11,81	776.486.203.302,82	868.740.370.054,39	971.921.129.829,14	1.087.368.019.346,22	1.216.539.236.230,70
1	Belanja Pegawai	689.540.857.441,10	11,89	775.722.474.602,82	867.940.370.054,39	971.121.129.829,14	1.086.568.019.346,22	1.215.739.236.230,70
2	Belanja Bunga	36.157.840,95	-76,76	-	-	-	-	-
3	Belanja bagi hasil	73.314.450,00	20,31	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Belanja Bantuan Partai Politik	663.728.700,00	0,02	663.728.700,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
				-				
B	Belanja Langsung	77.757.227.365,00	23,25	81.871.421.950,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	60.000.000.000,00
1	Belanja honorarium PNS (Belanja Pegawai)	77.757.227.365,00	23,25	81.871.421.950,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	60.000.000.000,00
	TOTAL BELANJA	768,071,285,797,05		858.357.625.252,82	938.740.370.054,39	1.041.921.129.829,14	1.157.368.019.346,22	1.276.539.236.230,70

Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Malang

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2011	607.530.178.774,62	1.075.928.051.216,16	56,47
2	Tahun 2012	716.150.792.325,87	1.289.066.792.027,41	55,73
3	Tahun 2013	768.071.285.797,05	1.507.150.774.167,77	50,96

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang telah efisien dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Kenyataan tersebut dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi atas pengeluaran daerah sehingga dapat memaksimalkan hasil PAD yang diperoleh pemerintah daerah.

Rasio efisiensi sudah tepat digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemerintah daerah Kota Malang dalam menggunakan PAD untuk melakukan pengeluaran daerah yang digunakan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai alat pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana yang dibayarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis rasio keserasian menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kota Malang sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional sehingga rasio belanja aparatur menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan belanja modal, kendati masih dalam kisaran 50,6%. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki tidak diprioritaskan untuk kebutuhan belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang belum optimal dalam mengutamakan penyediaan sarana prasarana ekonomi bagi masyarakat. Rasio keserasian juga melihat kinerja pemerintah dalam mengalokasikan PAD untuk belanja. Adanya peningkatan belanja operasional dikarenakan adanya peningkatan atas belanja pegawai/ personalia seperti dokter, guru dan lain-lain, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Belanja operasi tersebut

digunakan sebagai bentuk peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Analisis trend pada rasio efektifitas Kota Malang untuk tahun 2013 sebesar 114,32% dan tahun 2012 sebesar 114,52% menunjukkan Kota Malang menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan PAD yang kecil yang dapat disebabkan kurangnya upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah. Pada rasio efisensi untuk tahun 2013 Kota Malang untuk tahun 2013 sebesar 93,273% dan untuk tahun 2012 92,32% yang berarti Kota Malang menunjukkan peningkatan dalam melakukan alokasi belanja terhadap PAD yang diterima sebagai tanggung jawab kepada masyarakat.

Analisis trend pada rasio keserasian belanja operasi Kota Malang tahun 2013 sebesar 79,694 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 78,52%. Sedangkan untuk belanja modal pada tahun 2013 menunjukkan presentase sebesar 26,613% dan tahun 2012 sebesar 21,23% dan analisis trend belanja modal untuk Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 23,292%, untuk tahun 2012 sebesar 21,23% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Malang untuk tahun 2013 terdapat upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana prasarana ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat yang

diimbangi dengan meningkatnya belanja operasi pada tahun 2013.

Berdasarkan kondisi tersebut maka diharapkan Pemerintah Daerah Kota Malang untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan dalam bidang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah Daerah Kota Malang juga harus melakukan efisiensi atas belanja daerah yang dikeluarkan sehingga dapat memaksimalkan realisasi penerimaan daerah.

Dalam upaya untuk meningkatkan rasio pertumbuhan diharapkan pemerintah daerah Kota Malang harus menetapkan target atau anggaran kerja yang benar-benar didukung oleh kondisi potensi wilayah serta pemanfaatan aparatur pemerintahan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah daerah secara maksimal. Serta, selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja seluruh elemen yang dimiliki oleh instansi untuk bekerja secara maksimal dalam usaha untuk pencapaian atas anggaran pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15.
Defisit Riil/ Surplus Anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun 2009 – 2013
(dalam Rp.)

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	Realisasi Pendapatan Daerah	798,840,456,272.21	988,288,099,524.78	1,102,655,771,801.76	1,356,369,664,977.83	1.524.846.569.429,26
2	Dikurangi Realisasi : Belanja Daerah	809,128,186,196.91	967,967,645,319.59	1,048,231,122,829.02	1,252,312,645,612.77	1.486.368.766.886,45
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,704,146,414.64	22,177,830,625.12	27,696,928,387.14	36,754,146,414.64	17.171.900.460,00
	Defisit Riil/Surplus	(14,991,876,339.34)	(1,857,376,419.93)	26,727,720,585.60	67,302,872,950.42	21.305.902.082,49

Berdasarkan tabel Defisit Riil Anggaran di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 defisit riil anggaran mencapai Rp. 14,991,876,339.34 dan pada tahun 2010 defisit riil mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp. 1,857,376,419.93, dan pada tahun – tahun berikutnya Anggaran Pemerintah Kota Malang memperoleh surplus anggaran, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 26,727,720,585.60 dan pada tahun 2012 mencapai Rp. 67,302,872,950.42. dan pada tahun 2013 mencapai surplus sebesar Rp. 21.305.902.082,49.

Tabel 3.16.
Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Malang

No.	Uraian	Tahun Anggaran		
		2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1,102,655,771,801.76	1,356,369,664,977.83	1,485,322,092,001.87
	Dikurangi realisasi :			
2.	Belanja Daerah	1,048,231,122,829.02	1,252,312,645,612.77	1,489,978,873,707.45
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	27,696,928,387.14	36,754,146,414.64	17,171,900,460.32
A.	Defisit Riil	26,727,720,585.60	67,302,872,950.42	(21,828,682,165.90)
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran	94,195,152,198.36	161,443,965,225.79	182,749,867,308.28

	sebelumnya			
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	94,195,152,198.36	161,443,965,225.79	182,749,867,308.28
(A-B)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	67,467,431,612.76	94,141,092,275.37	204,578,549,474.18

Tabel 3.17.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Malang

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100,00	100,00	100,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian	0,00	0,00	0,00

	Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00

Tabel 3.18.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun 2009 – 2013
(dalam Rp.)

NO	URAIAN	2011		2012		2013		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILP A	Rp.	% dari SILP A	
	JUmlah SILPa	94,195,152,198.36	100	161,443,965,225.79	100	182,749,867,308.28	100	
1	Pelampauan Pendapatan Asli Daerah	23,485,975,523.21		29,139,022,987.96		19.433.024.655,39		
2	Pelampauan Dana Perimbangan	5,677,294,743.49		39,209,974,409.00		26.835.452.772		
3	Pelampauan Lain-lain Pendapatan Daerah yang	(5,389,925,155.00)		(31,271,368,912.00)		(6.744.000.000,00)		

	sah							
4	Penghematan Belanja	70,421,807,086.66		109,366,335,486.8	3	143.225.389.253,8	9	
5	Penghematan pengeluaran pembiayaan			15,000,001,254.00		627		
	Defisit Riil/Surplus	94,299,406,607.37		161,443,965,225.7	9	182.749.867.308,2	8	

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu 2009 – 2013 memiliki kecenderungan meningkat, dari Rp.69,429,062,441.70 pada tahun 2009, hingga mencapai Rp. 182.749.867.308,28. Komponen SiLPA yang terbesar berasal dari Penghematan Belanja, dimana pada tahun 2009 sebesar Rp. 31,006,764,151.93 dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 143.225.389.253,89.

Tabel 3.19.
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kota Malang

No.	Uraian	(2011) (Rp)	(2012) (Rp)	(2013) (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	96.269.159.779,86	161.484.283.852,20	182.776.837.119,65
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	5.815.363.352,88	1.783.651.905,00	3.255.611.049,50
3.	Kegiatan lanjutan	0,00	68.163.500.000,00	56.400.211.000,00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	90.453.796.426,98	91.537.131.947,20	123.121.015.070,15

Tabel 3.20.
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Kota Malang 2014 - 2018

No	Uraian	Data tahun dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	182.776.837.119,65	40,46	210.193.362.687,60	231.212.698.956,36	247.397.587.883,30	262.241.443.156,30	275.353.515.314,12
	Dikurangi:							
1.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	3.255.611.049,50	6,60	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00
2.	Kegiatan lanjutan	56.400.211.000,00		-	-	20.000.000.000,00	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	123.121.015.070,15	17,85	208.193.362.687,60	229.712.698.956,36	246.397.587.883,30	261.241.443.156,30	274.853.515.314,12

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas maka akan dapat dilakukan analisis proyeksi pembiayaan daerah untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain:

- 1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
- 2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- 3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;
- 4) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan

Semua aspek tersebut akan di bahas lebih lanjut pada bagian pembahasan berikutnya.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Prinsip pengelolaan ini harus tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

3.3.1 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.21.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Kota Malang

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Total penerimaan	1.755.862.893.484	1.956.999.793.773,7	2.175.358.105.938,3	2.416.790.857.481,8	2.685.155.856.787,6
1.	Pendapatan	1.547.669.530.797	1.727.287.094.817	1.928.960.518.054,1	2.155.549.414.325,5	2.410.302.341.473,5
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	208.193.362.687,60	229.712.698.956,36	246.397.587.883,30	261.241.443.156,30	274.853.515.314,12
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	890.457.625.252,82	958.740.370.054,39	1.061.921.129.829,1	1.177.368.019.346,2	1.301.539.236.230,7
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	865.405.268.231,87	998.259.423.719,32	1.113.436.976.109	1.239.422.838.135	1.383.616.620.556

Tabel 3.22.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Malang

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	865.405.268.231,87	998.259.423.719,3	1.113.436.976.109,1	1.239.422.838.135	1.383.616.620.556
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	857.741.673.340,00	943.515.840.674	1.037.867.424.741,4	1.141.654.167.215	1.255.819.583.937
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi:					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	81.871.421.950,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	60.000.000.000,00
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	32.100.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	807.970.251.390,00	893.515.840.674	987.867.424.741,4	1.091.654.167.215	1.220.819.583.937
	Sisa kapasitas riil	57.435.016.841,87	104.743.583.045,3 2	125.569.551.367,75	147.768.670.920,02	162.797.036.619,88

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	825.928.369.502,82	908.521.206.453,1	999.373.327.098,42	1.099.310.659.808	1.209.241.725.789
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	776.486.203.302,82	868.740.370.054,3	971.921.129.829,14	1.087.368.019.346	1.216.539.236.230
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	49.442.166.200,00	39.780.836.398,71	27.452.197.269,27	11.942.640.462,04	(7.297.510.441,62)
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	7.992.850.641,87	64.962.746.646,61	98.117.354.098,48	135.826.030.457,98	170.094.547.061,49

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.23.
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

	Jenis Dana	Alokasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Prioritas I	684,316,459,348.06	758,248,105,282.87	834,072,915,811.15	917,480,207,392.27	1,009,228,228,131.50
	%	40.60 %	40.51 %	40.53 %	40.56 %	40.46 %
2.	Prioritas II	852,812,960,690.00	938,094,256,759.00	1,031,903,682,434.90	1,135,094,050,678.39	1,248,603,455,746.23
	%	50.58 %	50.11 %	50.15 %	50.18 %	50.06 %
3.	Prioritas III	148,770,461,571.00	175,559,781,579.46	191,740,759,737.41	209,539,835,711.15	236,368,819,282.26
	%	8.82 %	9.38 %	9.32 %	9.26 %	9.48 %
	Total	1,685,899,881,609.06	1,871,902,143,621.33	2,057,717,357,983.46	2,262,114,093,781.81	2,494,200,503,159.99

Berdasarkan tabel 3.23 di atas, rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berupa total penerimaan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Disamping itu Program

prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing SKPD.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.